PEMERINTAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2025

LAPORAN KEUANGAN

SEKRETARIAT DAERAH
KAB. LIMA PULUH KOTA

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 merupakan pertanggung jawaban kegiatan yang dananya bersumber dari DPA dan DPPA Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.

Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 masih belum sempurna untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai proses pembelajaran (*learning process*) demi penyempurnaan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang.

Sarilamak, Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH

HERMAN AZMAR, AP, M.Si
NIP. 19730913 199311 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang tediri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sarilamak, Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH

HERMAN AZMAR, AP, M.Si
NIP. 19730913 199311 1 001

DAFTAR ISI

		Hal
Kata Pengantar		i
Pernyataan Tanggung Jawab		ii
Daftar Isi		iii
LRA Konversi		iv
NERACA		v
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah	1
	1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
	1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan	2
	1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
	1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	3
BAB II	KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	
	2.1 Kebijakan Keuangan	5
	2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	5
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.	
	3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	7
	3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan	8
BAB IV	KEBIJAKAN AKUTANSI	
	4.1 Entitas Akuntansi	11
	4.2 Basis Akutansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keu...	11
	4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	12
	4.4 Penerapan Kebijakan Kebijakan Akutansi Berkaitan dengan	

Ketentuan yang ada dalam standar akutansi pemerintah..... 15

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja..... 18

5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca 23

A. Aset

B. Penyusutan

C. Kewajiban

D. Ekuitas

5.3 Laporan Operasional..... 27

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)..... 30

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 32

BAB VII PENUTUP 34

LAMPIRAN

Lampiran A : Rekapitulasi Setoran Belanja GU dan TU

Lampiran B : Rekapitulasi Pajak 2021

Lampiran C : Rekapitulasi Pajak yang Belum Disetorkan Per 31 Desember 2021

Lampiran D : Rekapitulasi Contra Post Per 31 Desember 2021

Lampiran E : Rekapitulasi Inventaris Per 31 Desember 2021

Lampiran F : Rekapitulasi Persediaan Per 31 Desember 2021

Lampiran G : Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Belanja DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NERACA

SEKRETARIAT DAERAH

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No. Akun	Uraian	2025	2024
1.	ASET		
1.1.	ASET LANCAR		
1.1.01.	Kas dan Setara Kas		
1.1.01.02.	Kas di Bendahara Penerimaan		-
1.1.01.03.	Kas di Bendahara Pengeluaran		-
1.1.01.04.	Kas di BLUD		
1.1.01.05.	Kas Dana BOS		
1.1.01.06.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
1.1.01.07.	Kas Lainnya		
1.1.03.	Piutang Pajak Daerah		
1.1.04.	Piutang Retribusi		
1.1.05.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.05.03.	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta	2.070.000,00	2.070.000,00
1.1.06.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.06.06.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
1.1.06.07.	Piutang Pendapatan Bunga		
1.1.06.15.	Piutang Lainnya-Kend. R-2 Kades	76.500.000,00	76.500.000,00
1.1.06.16.	Piutang Pendapatan BLUD		
1.1.06.18.	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		
1.1.06.19.	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
1.1.07.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
1.1.07.01.	Piutang Dana Perimbangan		
1.1.08.	Piutang Transfer Antar Daerah		
1.1.08.01.	Piutang Bagi Hasil		
1.1.09.	Piutang Lainnya		
1.1.10.	Penyisihan Piutang		
1.1.10.01.	Penyisihan Piutang Pendapatan		
1.1.10.01.01.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
1.1.10.01.02.	Penyisihan Piutang Retribusi		
1.1.10.01.03.	Penyisihan Piut. Hasil Pengel.Kekyn Daerah Yg Dipisahkan	(2.070.000,00)	(2.070.000,00)
1.1.10.01.04.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	(76.500.000,00)	(76.500.000,00)
1.1.12.	Persediaan	293.870.654,00	278.744.036,00
	Jumlah Aset Lancar	293.870.654,00	278.744.036,00
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.01.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.01.05.	Dana Bergulir		
1.2.01.05.01.	Dana Bergulir Kepada Koperasi		
1.2.01.05.02.	Dana Bergulir Kepada Masyarakat		
	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		
	Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.02.	Investasi Jangka Panjang Permanen		
1.2.02.01.	Penyertaan Modal		
	Jumlah Investasi Jk.Panjang Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
1.3.	ASET TETAP		
1.3.01.	Tanah	22.005.069.500,00	22.005.069.500,00
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	36.013.158.487,00	35.380.601.299,00
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	31.650.618.185,48	31.114.113.305,48
1.3.04.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.279.156.743,27	74.279.156.743,27
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	629.361.400,00	629.361.400,00
1.3.06.	Konstruksi dalam Pengerjaan	16.672.000,00	39.329.900,00
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(92.997.059.481,95)	(88.189.427.299,96)
1.3.07.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(33.172.914.302,73)	(31.734.734.822,69)
1.3.07.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(9.318.956.295,20)	(8.895.202.787,65)
1.3.07.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(50.505.188.884,02)	(47.559.489.889,62)
1.3.07.04.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
	Jumlah Aset Tetap	71.596.976.833,80	75.258.204.947,79

No. Akun	Uraian	2025	2024
1.5.	ASET LAINNYA	3.252.060.456,00	1.875.041.997,00
1.5.03.	Aset Tidak Berwujud	74.870.000,00	74.870.000,00
1.5.03.01.	Aset Tidak Berwujud	74.870.000,00	74.870.000,00
1.5.03.01.01.0005.	Software	74.870.000,00	74.870.000,00
1.5.04.	Aset Lain-lain	3.177.190.456,00	1.800.171.997,00
1.5.04.01.	Aset lain-lain	3.177.190.456,00	1.800.171.997,00
1.5.04.01.01.0001.	Aset Rusak Berat/Usang	3.177.190.456,00	1.800.171.997,00
1.5.04.01.01.0002.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		
1.5.04.01.01.0005.	Aset lain-lain (BM Prop.)	-	-
1.5.05.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(74.870.000,00)	(74.870.000,00)
1.5.05.01.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(74.870.000,00)	(74.870.000,00)
1.5.06.	Akumulasi/ Amortisasi Penyusutan Aset Lain-lain	(3.177.190.456,00)	(1.800.171.997,00)
1.5.06.01.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (rusak berat)	(3.177.190.456,00)	(1.800.171.997,00)
	Jumlah Aset Lainnya	-	-
	JUMLAH ASET	71.890.847.487,80	75.536.948.683,79
2.	KEWAJIBAN	46.515.006,00	112.961.467,00
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	46.515.006,00	112.961.467,00
2.1.01.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga		-
2.1.05.	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
2.1.06.	Utang Belanja	46.515.006,00	112.961.467,00
2.1.06.02.	Utang Belanja Barang dan Jasa	46.515.006,00	112.961.467,00
2.1.06.02.02.	Utang Belanja Jasa	46.515.006,00	112.961.467,00
2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	249.170,00
2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	5.591.425,00	10.746.290,00
2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	40.923.581,00	78.143.206,00
2.1.06.02.02.0062.	Utang Belanja Jasa Kantor-Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		
2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	23.822.801,00
2.1.07.	Utang Jangka Pendek Lainnya		
	JUMLAH KEWAJIBAN	46.515.006,00	112.961.467,00
3.	EKUITAS		
3.1.	EKUITAS		
3.1.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.01.	Ekuitas	71.844.332.481,80	75.423.987.416,79
	JUMLAH EKUITAS	71.844.332.481,80	75.423.987.416,79
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	71.890.847.487,80	75.536.948.683,79

Sarilamak, Maret 2026

PENGGUNA ANGGARAN

HERMAN AZMAR, AP, M.Si

NIP. 19730913 199311 1 001

PEMERINTAHAN KAB. LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	200.000.000,00	173.517.000,00	86,75	30.580.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200.000.000,00	173.517.000,00	86,75	30.580.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	200.000.000,00	173.517.000,00	86,75	30.580.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	200.000.000,00	173.517.000,00	86,75	30.580.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000.000,00	173.517.000,00	86,75	30.580.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	200.000.000,00	173.517.000,00	86,75	30.580.000,00
5	BELANJA DAERAH	40.971.527.809,00	37.531.946.331,00	91,60	36.854.766.616,00
5.1	BELANJA OPERASI	40.120.857.809,00	36.820.673.121,00	91,77	35.810.820.424,00
5.1.01	Belanja Pegawai	15.986.666.014,00	14.859.516.539,00	92,94	13.333.729.975,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.734.238.420,00	9.896.685.017,00	92,19	8.504.734.908,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.588.925.398,00	4.342.988.355,00	94,64	4.140.348.335,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	105.240.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	253.189.194,00	209.530.167,00	82,75	171.560.332,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	410.313.002,00	410.313.000,00	99,99	411.846.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.435.061.412,00	18.874.456.582,00	92,36	20.905.815.449,00
5.1.02.01	Belanja Barang	3.771.544.000,00	3.327.863.224,00	88,23	4.085.417.803,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	10.525.628.412,00	10.025.400.374,00	95,24	10.009.045.210,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.404.103.000,00	2.122.490.789,00	88,28	2.356.882.425,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.054.386.000,00	1.845.588.995,00	89,83	2.709.176.691,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.679.400.000,00	1.553.113.200,00	92,48	1.745.293.320,00
5.1.05	Belanja Hibah	3.699.130.383,00	3.086.700.000,00	83,44	1.571.275.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.699.130.383,00	3.086.700.000,00	83,44	1.571.275.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	40.120.857.809,00	36.820.673.121,00	91,77	35.810.820.424,00
5.2	BELANJA MODAL	850.670.000,00	711.273.210,00	83,61	1.043.946.192,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	850.670.000,00	711.273.210,00	83,61	1.043.946.192,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	950.000,00	800.000,00	84,21	2.670.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	728.033.000,00	594.751.640,00	81,69	604.676.192,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	111.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	121.687.000,00	115.721.570,00	95,09	325.600.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	850.670.000,00	711.273.210,00	83,61	1.043.946.192,00
	JUMLAH BELANJA	40.971.527.809,00	37.531.946.331,00	91,60	36.854.766.616,00
	SURPLUS/DEFISIT	(40.771.527.809,00)	(37.358.429.331,00)	91,62	(36.824.186.616,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(40.771.527.809,00)	(37.358.429.331,00)	91,62	(36.824.186.616,00)

Kab. Lima Puluh Kota, Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH

Herman Azman, AP, M.Si.
NIP.197306131993111001

PEMERINTAHAN KAB. LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	173.517.000,00	30.580.000,00	142.937.000,00	467,42
7,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	173.517.000,00	30.580.000,00	142.937.000,00	467,42
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	173.517.000,00	30.580.000,00	142.937.000,00	467,42
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	173.517.000,00	30.580.000,00	142.937.000,00	467,42
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	173.517.000,00	30.580.000,00	142.937.000,00	467,42
	JUMLAH PENDAPATAN	173.517.000,00	30.580.000,00	142.937.000,00	467,42
8	BEBAN	41.076.980.638,99	69.407.617.260,68	(28.330.636.621,69)	(40,82)
8,1	BEBAN OPERASI	36.269.348.457,00	34.872.772.229,00	1.396.576.228,00	4,00
8.1.01	Beban Pegawai	14.859.516.539,00	13.333.729.975,00	1.525.786.564,00	11,44
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	9.896.685.017,00	8.504.734.908,00	1.391.950.109,00	16,37
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.342.988.355,00	4.140.348.335,00	202.640.020,00	4,89
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	105.240.000,00	(105.240.000,00)	(100,00)
8.1.01.05	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	209.530.167,00	171.560.332,00	37.969.835,00	22,13
8.1.01.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta	410.313.000,00	411.846.400,00	(1.533.400,00)	(0,37)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	18.323.131.918,00	19.967.767.254,00	(1.644.635.336,00)	(8,24)
8.1.02.01	Beban Barang	3.318.415.628,00	4.040.090.522,00	(721.674.894,00)	(17,86)
8.1.02.02	Beban Jasa	9.958.953.913,00	10.065.936.176,00	(106.982.263,00)	(1,06)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	1.647.060.182,00	1.407.270.545,00	239.789.637,00	17,04
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	1.845.588.995,00	2.709.176.691,00	(863.587.696,00)	(31,88)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.553.113.200,00	1.745.293.320,00	(192.180.120,00)	(11,01)
8.1.05	Beban Hibah	3.086.700.000,00	1.571.275.000,00	1.515.425.000,00	96,45
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.086.700.000,00	1.571.275.000,00	1.515.425.000,00	96,45
	JUMLAH BEBAN OPERASI	36.269.348.457,00	34.872.772.229,00	1.396.576.228,00	4,00
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	4.807.632.181,99	34.534.845.031,68	(29.727.212.849,69)	(86,08)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.438.179.680,04	1.688.046.872,02	(249.867.191,98)	(14,80)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	423.753.507,55	186.988.074,31	236.765.433,24	126,62
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.945.698.994,40	31.925.255.484,35	(28.979.556.489,95)	(90,77)
8.1.08.07	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0,00	734.554.591,00	(734.554.591,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	4.807.632.181,99	34.534.845.031,68	(29.727.212.849,69)	(86,08)
	JUMLAH BEBAN	41.076.980.638,99	69.407.617.260,68	(28.330.636.621,69)	(40,82)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(40.903.463.638,99)	(69.377.037.260,68)	28.473.573.621,69	(41,04)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(40.903.463.638,99)	(69.377.037.260,68)	28.473.573.621,69	(41,04)
POS LUAR BIASA					
8,5	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(40.903.463.638,99)	(69.377.037.260,68)	28.473.573.621,69	(41,04)

Kab. Lima Puluh Kota, Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH

Herman Azmar, AP, M.Si.
NIP.197309131993111001

PEMERINTAH KAB. LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	75.423.987.416,79	49.064.829.532,47
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(40.903.463.638,99)	(69.377.037.260,68)
RK PPKD	37.378.308.704,00	36.824.186.616,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(54.500.000,00)	58.912.008.529,00
EKUITAS AKHIR	71.844.332.481,80	75.423.987.416,79

Kab. Lima Puluh Kota, Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH

Herman Azmar, AP, M.Si.
NIP.197309131993111001

PEMERINTAHAN KAB. LIMA PULUH KOTA

SEKRETARIAT DAERAH

NERACA

TAHUN ANGGARAN 2025

1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	**ASET**	**71.890.847.487,80**	**75.536.948.883,79**
1.1	**ASET LANCAR**	**293.870.654,00**	**278.744.036,00**
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(37.358.429.331,00)	0,00
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	(37.358.429.331,00)	0,00
1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah	2.070.000,00	2.070.000,00
1.1.05.03	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah	2.070.000,00	2.070.000,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	76.500.000,00	76.500.000,00
1.1.06.15	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	76.500.000,00	76.500.000,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(78.570.000,00)	(78.570.000,00)
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(78.570.000,00)	(78.570.000,00)
1.1.12	Persediaan	293.870.654,00	278.744.036,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	293.870.654,00	278.744.036,00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	37.358.429.331,00	0,00
1.1.13.01	RK SKPD	37.358.429.331,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	**293.870.654,00**	**278.744.036,00**
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**0,00**	**0,00**
1.3	**ASET TETAP**	**71.596.976.833,80**	**75.258.204.847,79**
1.3.01	Tanah	22.005.069.500,00	22.005.069.500,00
1.3.01.01	Tanah	22.005.069.500,00	22.005.069.500,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	36.013.158.487,00	35.380.601.299,00
1.3.02.01	Alat Besar	104.062.000,00	103.262.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	14.757.743.475,00	14.757.743.475,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	85.117.000,00	85.117.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.168.970.360,00	13.649.680.320,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.288.067.643,00	1.288.460.465,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.062.500,00	4.062.500,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	5.152.720,00	5.152.720,00
1.3.02.10	Komputer	4.942.075.389,00	4.826.928.819,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	518.519.000,00	518.519.000,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	139.388.400,00	141.675.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	31.650.618.185,48	31.114.113.305,48
1.3.03.01	Bangunan Gedung	31.323.942.366,48	30.787.437.486,48
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	326.675.819,00	326.675.819,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.279.156.743,27	74.279.156.743,27
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	15.524.894.355,27	15.524.894.355,27
1.3.04.03	Instalasi	58.590.044.888,00	58.590.044.888,00
1.3.04.04	Jaringan	164.217.500,00	164.217.500,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	629.361.400,00	629.361.400,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	15.164.500,00	15.164.500,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	549.416.900,00	549.416.900,00
1.3.05.05	Tanaman	38.830.000,00	38.830.000,00
1.3.05.06	Barang Koleksi Non Budaya	25.950.000,00	25.950.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.672.000,00	39.329.900,00
1.3.06.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	16.672.000,00	16.672.000,00
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	0,00	22.657.900,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(92.997.059.481,95)	(88.189.427.299,96)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(33.172.914.302,73)	(31.734.734.622,69)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(9.318.956.295,20)	(8.895.202.787,65)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(50.505.188.884,02)	(47.559.489.889,62)
	JUMLAH ASET TETAP	**71.596.976.833,80**	**75.258.204.847,79**
	JUMLAH DANA CADANGAN	**0,00**	**0,00**
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	74.870.000,00	74.870.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	74.870.000,00	74.870.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	3.177.190.456,00	1.800.171.997,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	3.177.190.456,00	1.800.171.997,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(74.870.000,00)	(74.870.000,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(74.870.000,00)	(74.870.000,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.177.190.456,00)	(1.800.171.997,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.177.190.456,00)	(1.800.171.997,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH ASET	**71.890.847.487,80**	**75.536.948.883,79**

2	**KEWAJIBAN**	**46.515.006,00**	**112.961.467,00**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**46.515.006,00**	**112.961.467,00**
2.1.06	Utang Belanja	46.515.006,00	112.961.467,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	46.515.006,00	112.961.467,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**46.515.006,00**	**112.961.467,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**46.515.006,00**	**112.961.467,00**
3	**EKUITAS**	**71.844.332.481,80**	**75.423.987.416,79**
3.1	**EKUITAS**	**71.844.332.481,80**	**75.423.987.416,79**
3.1.01	Ekuitas	34.466.023.777,80	38.599.800.800,79
3.1.01.01	Ekuitas	75.369.487.416,79	107.976.838.061,47
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(40.903.463.638,99)	(69.377.037.260,68)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidaskan	37.378.308.704,00	36.824.186.616,00
3.1.03.01	RK PPKD	37.378.308.704,00	36.824.186.616,00
	JUMLAH EKUITAS	**71.844.332.481,80**	**75.423.987.416,79**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**71.890.847.487,80**	**75.536.948.883,79**

Kab. Lima Puluh Kota, Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH

Herman Azmar, AP, M.Si.

NIP 197309131993111001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Realisasi atas pendapatan dan belanja menunjukkan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA dan DPPA Tahun Anggaran 2025, sehingga diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja yang bersangkutan. Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Necara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan Keuangan

diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali *(trace back)* pos-pos laporan keuangan.

1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Ekonomi Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123).
- Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi hal-hal sebagai berikut :

I. Pendahuluan
   - 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah;
   - 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
   - 1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan;
   - 1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
   - 1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

II. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
   - 2.1 Kebijakan Keuangan;
   - 2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD;

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
   - 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan;
   - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

IV. Kebijakan Akuntansi

4.1 Entisitas Akuntansi;

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan;

V. Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan

5.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca

A. Aset

B. Penyusutan

C. Kewajiban

D. Ekuitas

5.3. Laporan Operasional

5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

A. Kedudukan

B. Struktur Organisasi

C. Aspek Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

D. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan

VII. Penutup.

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota dalam mengelola DPA Tahun Anggaran 2025 meliputi hal berikut :

2.2.1. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang.

Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Ada pun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.2 Indikator pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/ dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Dengan demikian, DPA Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2025, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 3 Program, 19 Kegiatan yang didukung oleh 61 Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
11. Kegiatan Penataan Organisasi;
12. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
13. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan;
14. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
15. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah;
16. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
17. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan;
18. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
19. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam;

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Pendapatan

Pada Tahun 2025 terdapat 1 (satu) sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana rincian tabel dibawah ini.

Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025

Jenis pendapatan	Anggaran Rp	Realisasi	
		Rp	%
Pendapatan Asli Daerah	200.000.000,00	173.517.000,00	86,76
Retribusi Daerah	200.000.000,00	173.517.000,00	86,76
Retribusi Jasa Umum	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Retribusi Pembuatan Besteк / Design atau gambar proyek	0,00	0,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000,00	1730.517.000,00	86,76
Retribusi Perizinan Tertentu	*0,00*	*0,00*	*0'00*
Retribusi Izin Gangguan / Keramaian	0,00	0,00	0,00
Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00
Izin penjualan dan penyewaan kaset video	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**200.000.000,00**	**173.517.000,00**	**86,76**

3.1.2 Belanja

Total realisasi belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 37.531.946.331,00. Jumlah tersebut mencapai 91,60 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 40.971.527.809,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Pegawai	**15.986.666.014,00**	**14.859.516.539,00**	92,95
Belanja Barang dan Jasa	**20.435.061.412,00**	**18.874.456.582,00**	92,36
Belanja Hibah	**3.699.130.383,00**	**3.086.700.000,00**	83,44
Belanja Modal	**850.670.000,00**	**711.273.210,00**	83,61
Jumlah	**40.971.527.809,00**	**37.531.946.331,00**	**91,60**

Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp. 15.986.666.014,00 terealisasi sebesar Rp. 14.859.516.539,00 atau sebesar

92,95 %. Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 20.435.061.412,00 terealisasi sebesar Rp. 18.874.456.582,00 atau sebesar 92,36 %. Pada Tahun 2025 belanja hibah dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 3.699.130.383,00, terealisasi sebesar Rp. 3.086.700.000,00 atau sebesar 83,44 %. Sedangkan untuk belanja modal anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 850.670.000,00, terealisasi sebesar Rp. 711.273.210,00 atau sebesar 83,61 %.

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN.

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan berkaitan dengan proses pencairan dana APBD. Disamping itu perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada akhir November 2025 maka ada beberapa kegiatan pengadaan tidak dapat terlaksana karena tidak cukup waktu untuk proses pengadaannya dan begitu juga dalam pencairan dana kegiatan tersebut.

Ke 19 (sembilan belas) Kegiatan tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi kinerja yang berkisar 80 – 100 %. Hanya ada 10 (sepuluh) sub kegiatan yang realisasi kinerjanya dibawah 80 % yaitu :

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah realisasinya hanya 73,93 %. Hal ini disebabkan karena jadwal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang cukup padat serta belum menjadi Urgensi untuk dilaksanakan, namun hal ini tidak mengganggu kinerja Kepa la Daerah maupun kinerja perangkat daerah karena hanya bersifat opsional bagi Kepala Daerah/ Wakil KDH.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD realisasinya hanya 70,30 %.. Hal ini disebabkan Karena pada kegiatan ini ada beberapa belanja Cetak dan Lembur yang direncanakan tidak terealisasi sesuai target, karena kegiatan cetak tidak banyak dilaksanakan karena menyesuaikan dengan kebutuhan
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu realisasinya hanya 71,95 %. Hal ini disebabkan Karena Kegiatan ini bersifat kondisonal tidak rutin atau volume kunjungan tamu lebih sedikit dari yang direncanakan, Fasilitasi tamu sering

kali bersifat non reguler atau hanya berdasarkan undangan mendadak sehingga pemanfaatannya tidak konsisten.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasinya hanya 45,86 %. Hal ini disebabkan karena tidak terlaksananya pembelian suku cadang genset karena tidak tersedianya suku cadang komponen genset di pasaran/ tipe genset yang sudah tipe lama.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya realisasinya hanya 50,33 %. Hal ini disebabkan karena tidak terlaksananya pengecatan kantor karena factor eksternal cuaca pada akhir tahun tidak mendukung karena sering terjadi hujan yang mengakibatkan waktu pengerjaan cat kantor dikhawatirkan tidak selesai sesuai jadwal.
- Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah realisasinya hanya 79,78 %. Hal ini desebabkan karena pada tahun berjalan akhir tahun 2025 ini, setelah melihat kebutuhan rumah tangga wakil bupati dirasa sudah mencukupi target belanja pada APBD 2025 ini, hal ini juga terkait dengan penyesuaian belanja di pasaran sehingga diharapkan terjadi efisiensi belanja yang diinginkan.
- Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan realisasinya hanya 70,63 %. Hal ini disebabkan karena tidak terlaksananya Camat Berprestasi pada Tahun 2025, sehingga kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar koordinasi dan memfasilitasi kegiatan yang dilakukan di Perangkat Daerah atau Daerah Lain.
- Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum realisasinya hanya 73,81 %. Hal ini disebabkan karena pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang secara umum bersifat koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kementrian terkait. Dengan terjadinya bencana alam yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat yang berakibat rusaknya jalan yang menghubungkan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Provinsi dan Kementrian yang bertempat di Kota Padang, sehingga kegiatan koordinasi dan konsultasi tidak dapat dilaksanakan secara langsung atau tatap muka dan hanya dapat dilakukan secara daring. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab serapan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Bahan Bakar Minyak tidak Optimal.
- Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian realisasinya hanya 76,75 %. Hal ini disebabkan karena rencana pelaksanaan *Capacity Building*

TPID Kabupaten Lima Puluh Kota ke Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok pada akhir November 2025 tidak terealisir kerena bencana alam (cuaca ekstrem dan hidrometerologi) banyak terjadi pada tahun lalu.

- Sub Kegiatan Koordinasi, Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup realisasinya hanya 70,38 %. Hal ini disebabkan karena realisasi fisik kegiatan ini hamper mencapai 100 %, tetapi karena ada shering dana dengan KKI WARSI dalam peleksanaan kegiatan *workshop* Penguatan Perhutanan Social dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat serta pelatihan *Digital Marketing*, sehingga dana kegiatan ini bersisa.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka basis akuntansi yang digunakan adalah basis akuntansi akrual.

4.1 Entitas Akuntansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2024 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah *basis akuntansi akrual.*

- Basis akuntansi yang *digunakan dalam* penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja dalam laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian Aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual.

  Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- Basis akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/ nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

c. Investasi Jangka Pendek

Investasi dalam bentuk surat berharga :

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank dan biaya lainnya.
- Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasar.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

d. Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

e. Investasi Jangka Panjang.

Secara umum investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambaha lainnnya yang terjadi untuk memperolehn kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atau perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost. Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

f. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya apraisal dan honor tim/ panitia pengadaan.

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan nilai perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/ taksiran pada saat perolehan.

h. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan ,irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

j. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

k. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Pengukuran biaya pengukuran dipengaruhi oleh meteode yang digunakan dalam

proses konstruksi aset tetap tersebut yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi. Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola maka biaya-biaya yang diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk konstruksi dalam pengerjaan tersebut. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah yang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan konstruksi dalam pengerjaan tersebut meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali penyajian aset. Hal ini disebabkan karena belum diperhitungkannya nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut.

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hal pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah ; atau
2. Diterima oleh SKPD ; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompesasikan dengan pengeluaran)

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned* ; atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompesasikan dengan pengeluaran).

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pmerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat :

1. Timbulnya kewajiban

   Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

2. Terjadinya konsumsi aset.

   Terjadinya komsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

   Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan / berlalunya waktu.

   Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

BAB V

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Perkiraan	Realisasi 2025 (Rp)		Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**173.517.000,00**		**30.580.000,00**
	Jumlah tersebut merupakan realisasi dan target penerimaan pendapatan retribusi daerah dalam tahun anggaran 2024 yang terdiri dari :			
	• Retribusi Pembuatan Bestek/ Design gambar proyek	0,00		0,00
	• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	173.517.000,00		30.580.000,00
	• Retribusi Izin Gangguan / Keramaian	0,00		0,00
	• Retribusi Perizinan Tertentu	0,00		0,00
	• Izin penjualan dan penyewaan kaset video	0,00		0,00
	• Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	0,00		0,00
	Sub Jumlah	**173.517.000,00**		**30.580.000,00**
	Jumlah realisasi tersebut mencapai 86,75 % dari jumlah yang ditargetkan sebesar Rp. 200.000.000,00. dimana terdapat 1 (satu) Jenis Retribusi yakni Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,00. dapat terealisasi sebesar Rp. 173.517.000,00.			
5.1.2	**Belanja Pegawai**	**14.859.516.539,00**		**13.333.729.975,00**
	Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja pegawai dalam tahun anggaran 2025. Jumlah realisasi mencapai 92,95 % dari anggaran belanja pegawai yang ditetapkan. Rincian belanja Pegawai tersebut terinci sebagai berikut :			
	Belanja Pegawai	**14.859.516.539,00**		**13.333.729.975,00**
	- Gaji dan Tunjangan ASN	9.896.685.017.00		8.504.734.908.00
	- Tambahan penghsian ASN	4.342.988.355,00		4.140.348.335,00
	- Tambahan Objektif Lainnya	0,00		105.240.000,00
	- Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	209.530.167,00		171.560.332,00
	- Dana Operasional KDH/WKDH	410.313.000,00		411.846.400,00
	Jumlah	**14.859.516.539,00**		**13.333.729.975,00**
5.1.3	**Belanja Barang dan Jasa**	**18.874.456.582,00**		**20.905.815.449,00**
	Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja barang dan jasa dalam tahun anggaran 2025. Jumlah realisasi mencapai 92,36 % dari anggaran yang ditetapkan.			
	Belanja Bahan Pakai Habis	**3.317.984.224,00**		**4.085.417.803,00**
	Blj bhn bangunan dan kontruksi	0,00		4.989.000,00

No	Perkiraan	Realisasi 2025 (Rp)		Realisasi 2024 (Rp)
	Blj bhn-bhn Kimia	1.080.000,00		0,00
	Blj BBM/ Pelumas	287.665.325,00		356.369.538,00
	Blj Bahan/ Bibit Tanaman	0,00		6.300.000,00
	Blj bhn-isi tabung gas	11.591.800,00		19.031.000,00
	Blj bhn-bhn lainnya	541.047.876,00		17.000.000,00
	Blj atk	189.678.094,00		167.726.716,00
	Blj kertas dan Cover	750.000,00		0,00
	Blj Alat/ Bahan utk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	155.841.366,00		255.020.998,00
	Blj Perangko, materai & bend pos	11.050.000,00		19.700.000,00
	Blj alat listrik & elektronik	43.985.040,00		148.308.500,00
	Blj Peralatan kebersihan	00,00		00,00
	Blj Prltan/Prlgkpn Ktr Pakai Habis	0,00		0,00
	Blj Alat Kantor/Prlgkpn Dinas	0,00		59.843.317,00
	Blj bhn keg. Kantor - prlgkpn pendukung olahraga	19.347.000,00		35.910.000,00
	Blj alat/bhn keg kantor-utk keg Kantor lainnya	27.265.028,00		325.965.934,00
	Blj bahan obat-obatan	10.400.000,00		7.650.000,00
	Blj natura dan pakan-pakan	7.200.000,00		0,00
	Blj makan minum rapat	79.575.900,00		110.335.660,00
	Blj makan minum jamuan tamu	1.240.864.527,00		2.064.809.880,00
	Blj makan minum aktivitas lapangan.	316.589.200,00		110.455.000,00
	Blj pakaian dinas KDH/ WKDH	178.112.068,00		187.043.260,00
	Blj pakaian dinas lapangan (PDL)	1.550.000,00		10.500.000,00
	Blj pakaian Adat Daerah	194.391.000,00		178.459.000,00
	Blj peralatan dan mesin-alat kantor RT-kantor lainnya	9.879.000,00		0,00
	Belanja Jasa Kantor	**8.658.820.032,00**		**8.691.040.284,00**
	Honorarium Narasumber/ Pembahas, Moderator dll	852.250.000,00		4.539.750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat dll	47.400.000,00		111.450.000,00
	Honorarium penyuluhan atau pendampingan	10.000.000,00		0,00
	Honorarium Rohaniwan	4.095.100.000,00		0,00
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dll	629.950.000,00		0,00
	Blj Jasa Tenaga Administrasi	1.279.000.000,00		950.103.471,00
	Belanja jasa tenaga pelayanan umum	183.170.000,00		321.311.230,00
	Blj Jasa Tenaga Ahli	26.250.000,00		49.950.000,00

No	Perkiraan	Realisasi 2025 (Rp)		Realisasi 2024 (Rp)
	Blj Jasa Tenaga Kebersihan	0,00		984.033.322,00
	Blj Jasa Tenaga Keamanan	55.050.000,00		94.950.000,00
	Blj Jasa Tenaga Sopir	0,00		329.708.330,00
	Blj Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	0,00		30.920.000,00
	Blj Jasa Kontribusi Asosiasi	115.760.295,00		30.000.000,00
	Blj Jasa Pencucian Pakaian, Alat Seni dan Budaya serta Alat RT	29.000.010,00		23.150.600,00
	Blj telepon	17.499.691,00		37.634.566,00
	Blj air	61.882.040,00		59.822.250,00
	Blj Listrik	483.428.678,00		537.778.042,00
	Blj kawat/faksimili/internet	114.799.695,00		117.430.928,00
	Blj penambahan daya	5.887.150,00		0,00
	Blj Pembayaran Pajak, Bea dll	92.128.309,00		67.606.645,00
	Blj Lembur	429.117.700,00		396.373.000,00
	Blj Medical Check Up	26.486.500,00		9.067.900,00
	Honor Penanggungjawaban pengelola keuangan	90.660.000,00		0,00
	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	**373.065.842,00**		**323.807.264,00**
	Blj iuran jaminan kesehatan bagi non ASN	78.687.504,00		97.050.464,00
	Blj iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	130.834.816,00		100.780.800,00
	Blj iuran jaminan kematian bagi non ASN	163.543.522,00		125.976.000,00
	Belanja Sewa Prltn dan Mesin	**382.158.000,00**		**315.805.000,00**
	Blj sewa alat besar darat lainnya	0,00		0,00
	Blj sewa kedaraan bermotor penumpang	0,00		126.000.000,00
	Blj sewa kedaraan bermotor angkutan barang	119.000.000,00		15.000.000,00
	Blj sewa alat RT lainnya	202.218.000,00		25.000.000,00
	Blj sewa peralatan umum	60.940.000,00		149.805.000,00
	Belanja sewa gedung dan bangunan	**92.802.000,00**		**265.845.000,00**
	Blj sewa bangunan gedung tempat pertemuan	12.660.000,00		9.000.000,00
	Blj sewa Taman	0,00		200.000.000,00
	Blj sewa hotel	80.142.000,00		56.845.000,00
	Belanja Sewa asset tetap lainnya	**0,00**		**0,00**
	Blj sewa alat musik	0,00		0,00
	Belanja Jasa Konsultansi	**0,00**		**0,00**

No	Perkiraan	Realisasi 2025 (Rp)		Realisasi 2024 (Rp)
	Konstruksi			
	Blj jasa konsultansi perencanaan arsitektur	0,00		0,00
	Blj jasa konsultansi pengawasan arsitektur	0,00		0,00
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	**518.554.500,00**		**412.547.662,00**
	Blj kursus-kursus singkat/ pelatihan	155.600.000,00		0,00
	Blj Sosialisasi	42.704.500,00		58.777.662,00
	Blj Bimbingan Teknis	320.250.000,00		353.770.000,00
	Belanja Pemeliharaan pritn dan mesin	**1.295.175.485,00**		**1.232.864.745,00**
	Blj pemel. Alat angkuta darat bermotor perorangan	214.557.012,00		195.850.914,00
	Blj pemel. Alat angkuta darat bermotor penumpang	886.521.873,00		828.577.346,00
	Blj pemel. Alat angkuta darat bermotor beroda dua	88.398.9500,00		90.041.505,00
	Blj pemel. Alat ktr/ RT dan alat ktr lainnya	45.390.150,00		53.198.080,00
	Blj pemel. Mebel	0,00		0,00
	Blj pemel. Alat pendingin	17.423.500,00		36.508.000,00
	Blj pemel. Alat ktr/ RT dan alat RT lainnya	0,00		0,00
	Blj pemel. Personal computer	38.447.000,00		28.688.900,00
	Blj pemel. komputer unit lainnya	4.437.000,00		0,00
	Belanja Pemeliharaan gdg dan bangunan	**827.315.304,00**		**1.124.017.680,00**
	Blj pemel. bangunan gdg tempat kerja-bangunan gdg kantor	519.397.934,00		0,00
	Blj pemel. bangunan gdg tempat kerja-gdg tmpt pertemuan	0,00		1.033.375.680,00
	Blj pemel. Bangunan gdg tempat tinggal-rmh Negara gol. I	307.917.370,00		90.642.000,00
	Belanja Pemeliharaan asset tetap lainnya	**0,00**		**0,00**
	Blj pemel. Tanaman	0,00		0,00
	Belanja Perjalanan Dinas	**1.845.588.995,00**		**2.709.176.691,00**
	Blj perjl.dinas biasa	1.723.678.995,00		2.664.726.691,00
	Blj perjl.dinas dalam kota	31.910.000,00		44.450.000,00
	Blj perjl.dinas luar negeri	90.000.000,00		0,00
	Belanja Uang/Jasa untuk diberikan kepada pihak	**1.553.113.200,00**		**1.745.293.320,00**

No	Perkiraan	Realisasi 2025 (Rp)		Realisasi 2024 (Rp)
	ketiga/pihak lain/masyarakat			
	Blj hibah yang bersifat perlombaan	0,00		1.715.300.000,00
	Blj penghargaan atas suatu prestasi	20.113.200,00		29.993.320,00
	Blj jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain	1.533.000.000,00		0,00
	Jumlah	**18.874.456.582,00**		**20.905.815.449,00**
5.1.4	**Belanja Hibah**	**3.086.700.000,00**		**1.571.275.000,00**
	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	**0,00**		**0,00**
	Blj Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	0,00		0,00
	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga yang Bersifat Nirlaba, sukarela dll	**3.086.700.000,00**		**1.571.275.000,00**
	Blj Hibah Uang Kepada Badan, Lembaga yang Bersifat Nirlaba, sukarela dan social berdasarkan Per-UU	660.000.000,00		500.000.000,00
	Blj Hibah Uang Kepada Badan, Lembaga yang Bersifat Nirlaba, sukarela dan social yang telah terdaftar	2.426.700.000,00		1.071.275.000,00
	Jumlah	**3.086.700.000,00**		**1.571.275.000,00**
5.1.5	**Belanja Modal**	**711.273.210,00**		**1.043.946.192,00**
	Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja modal dalam tahun 2025. Jumlah realisasi belanja modal sebesar 83,61 %, Belanja Modal dalam tahun 2025 terinci atas :			
	BM. Peralatan dan Mesin	**711.273.210,00**		**1.043.946.192,00**
	BM Peng. Pompa	0,00		0,00
	BM Peng. Alt Bantu Lainnya	800.000,00		2.670.000,00
	BM Peng. Alt penyimpanan perlengkapan kantor	0,00		0,00
	BM Peng. Alt Kantor Lainnya	8.470.000,00		0,00
	BM Peng. Alat Pembersih	0,00		17.500.000,00
	BM Peng. Meubelair	412.824.340,00		186.850.000,00
	BM Peng. Alat Pendingin	14.818.500,00		68.200.000,00
	BM Peng. Alat Dapur	0,00		0,00
	BM.Peng. Alat RT lainnya	158.638.800,00		308.126.192,00
	BM.Peng. Kursi Rapat Pejabat	0,00		24.000.000,00
	BM.Peng. Penghias ruangan	0,00		0,00
	BM Peng. Personal Computer	77.907.500,00		9.500.000,00
	BM Peng. Komputer Unit Lainnya	0,00		118.500.000,00
	BM Peng. Prltn Personal Computer	1.525.000,00		0,00
	BM Peng. Prltn Jaringan	14.985.000,00		0,00
	BM Peng. Prltn Kom Lainnya	21.304.070,00		197.600.000,00
	BM Peng. Alat Studio Video dll	0,00		111.000.000,00

No	Perkiraan	Realisasi 2025 (Rp)		Realisasi 2024 (Rp)
	BM Peng. Peralatan Cetak	0,00		0,00
	BM Peng. Peralatan Studio/ Audio	0,00		0,00
	BM. Gedung dan Bangunan	**0,00**		**0,00**
	BM Peng. Bangunan gdknitr	0,00		0,00
	BM. Aset Tetap Lainnya	**0,00**		**0,00**
	BM Peng. Buku Agama	0,00		0,00
	Jumlah	**711.273.210,00**		**1.043.946.192,00**

Dalam jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp. 711.273.210,00, dari anggaran yang ditetapkan sebesar RP. 850.670.000,00.

5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

A. Aset

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)		Tahun 2024 (Rp)
1.	Kas di Bend. Penerimaan			
2.	Kas di Bend. Pengeluaran	0,00		0,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan utang perhitungan pihak ketiga (pajak tahun 2024 yang disetor pada tahun 2025) sebesar Rp. 0,00 Rincian daftar terlampir.			
3.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah (Piutang lainnya)	**76.500.000,00**		**76.500.000,00**
	Jumlah tersebut merupakan sisa dari pembayaran kendaraan dinas mantan kepala desa sebesar Rp. 76.500.000,- yang belum diselesaikan sampai saat ini. Keadaan ini tidak berubah sejak Tahun 2006 yang merupakan sisa piutang yang belum disetor ke kas Daerah.			
4.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Piutang lainnya devident-BPR)	**2.070.000,00**		**2.070.000,00**
	Jumlah tesebut merupakan piutang devident BPR Kapung Baru Muaro Paiti Kec. Kapur IX tahun 2016 yang sampai 31 Desember 2016 belum disetorkan ke kas daerah, namun BPR tersbut sesuai dengan surat dari Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta Nomor : 5 / KDK. 03 / 2015 tanggal 02 Maret 2015 perihal Informasi Kondisi BPR disampaikan bahwa PT BPR LPN Kampung Baru Muaro Paiti ditetapkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR LPN Kampung Baru Muaro Paiti surat terlampir.			
5.	Penyisihan Piut. Hasil Pengel. Kekyn. Daerah Yg Dipisahkan	**(2.070.000,00)**		**(2.070.000,00)**
	Dengan retang waktu penyelesaian piutang yang lebih dari 5 tahun, berdasarkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah lima puluh kota maka penyisihan piutang lain-lain PAD sebesar 100 % dari piutang yang harus ditagih yakni senilai Rp. (2.070.000,00).			
6.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	**(76.500.000,00)**		**(76.500.000,00)**
	Dengan retang waktu lebih dari 5 tahun terhitung dari tahun 2006, berdasarkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah lima puluh kota maka penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar 100 % dari piutang yang harus ditagih yakni senilai Rp. (76.500.000,00).			

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)		Tahun 2024 (Rp)
7.	Persediaan	**293.870.654,00**		**278.744.036,00**
	Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024, yang terdiri dari : ATK, Obat-obatan, Peralatan Kebersihan, Alat Kantor dan RT dan Benda Pos (Rincian Persediaan disajikan terlampir).			
8.	Tanah	**22.005.069.500,00**		**22.005.069.500,00**
	Saldo Awal Tahun 2024 Nilai Aset Tanah sebesar Rp. 22.005.069.500,-. Pada Tahun 2025 jumlah Aset Tanah tetap. Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tanah yang dan dikuasai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2025 dan 2024. (Rincian Aset Tanah disajikan terlampir).			
9.	Peralatan dan Mesin	**36.013.158.487,00**		**35.380.601.299,00**
	Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dan dikuasai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2025 dan 2024. Jumlah peralatan dan mesin tersebut terdiri atas :			
	- Alat Besar	**108.917.000,00**		**105.592.000,00**
	- Alat Angkutan	**14.774.726.475,00**		**14.757.743.475,00**
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	**85.117.000,00**		**85.117.000,00**
	- Alat Kantor dan RT	**14.142.356.160,00**		**13.662.850.320,00**
	- Alat Studio/ Komunikasi dan Pemancar	**1.289.927.243,00**		**1.288.460.465,00**
	- Alat Kedokteran	**4.062.500,00**		**4.062.500,00**
	- Alat Labor	**5.152.720,00**		**5.152.720,00**
	- Komputer	**4.931.575.389,00**		**4.816.428.819,00**
	- Alat Keselamatan Kerja	**518.519.000,00**		**518.519.000,00**
	- Peralatan Olah Raga	**152.805.000,00**		**141.675.000,00**
	Pada Tahun 2024 Saldo Awal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 35.380.601.299,-. Pada Tahun 2025. Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp. 711.273.210,-. Dan pada Tahun 2025 terjadi pengurangan Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 78.716.022,-, yang terdiri dari Reklas keluar ke KIB C sebesar Rp. 18.537.000,-, berupa Backdrop Finil WPC dan Logo Pemda. Hibah/ Mutasi keluar ke Kapolres Kota Payakumbuh sebesar Rp. 9.700.000,-, berupa satu unit Kulkas, sesuai BAST No. 000.2.3.2/ 114/ Umum/ 2025, dan Hibah/ Mutasi keluar ke Kapolres Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp. 44.800.000,-, yang terdiri dari Lemari Pakaian 3 unit sebesar Rp. 13.650.000,-, Meja belajar 1 unit sebesar Rp. 1.750.000,-, Meja Riar 1 unit sebesar Rp. 3.500.000,-, Springbed 2 unit sebesar Rp. 10.750.000,-, Tempat tidur sebesar Rp. 3.500.000,-, AC sebesar Rp. 4.250.000,-, Mesin cuci sebesar Rp. 6.620.000,-, dan Blender sebesar Rp. 780.000,-, sesuai BAST No. 000.2.3.2/ 093/ Umum/ 2025. Belanja modal yang tidak dikapitalisir sebesar Rp. 575.000,-, berupa pajak mikrotuk. Pada Tahun 2025 terjadi koreksi kurang dari asset ekstracom Tahun 2025 sebesar Rp. 5.104.022,-, yang terdiri dari Blender sebesar Rp. 700.000,-, Kursi sebesar Rp. 350.000,-, Mejigcom 3 buah sebesar Rp. 1.374.600,-, Hetset sebesar Rp. 392.822,-, dan Reket Badminton 4 buah sebesar Rp. 2.286.600,-. Sehingga Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dan dikuasai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp. 36.013.158.487,00. (Rincian Aset Peralatan dan Mesin disajikan terlampir).			
10.	Gedung & Bangunan	**31.650.618.185,48**		**31.114.113.305,48**

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)		Tahun 2024 (Rp)
	Saldo Awal Tahun 2024 Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 31.114.113.305,48. Jadi pada Tahun 2025 Aset Gedung dan Bangunan bertambah sebesar Rp. 536.504.880,-, karena Kapitalisasi Barang dan Jasa menjadi asset sebesar Rp. 475.430.607,-, yang terdiri dari Rehab Mesjid Kantor Bupati sebesar Rp. 316.630.607,-, Rehab Rumah Dinas Wakil Bupati sebesar Rp. 109.405.000,-, dan Back Drop Aula Kantor Bupati sebesar Rp. 49.395.000,-. Hibah/ Mutasi masuk antar OPD sebesar Rp. 19.879.373,-, berupa Rehab gedung tempat kerja dari Damkar, Reklas Masuk dai Kib B sebesar Rp. 18.537.000,-, berupa Back Drop lantai finil WPC dan Logo Pemda, dan Reklas Masuk dari KDP sebesar Rp. 22.657.900,-, berupa Perencanaan rehab masjid kantor bupati. Sehingga Aset Gedung dan Bangunan yang dan dikuasai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 31.650.618.185,48. (Rincian Aset Gedung dan Bangunan disajikan terlampir).			
11.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	**74.279.156.743,27**		**74.279.156.743,27**
	Saldo Awal Tahun 2024 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 74.279.156.743,27. Pada Tahun 2025 Jalan, Irigasi dan Jaringan tetap (tidak ada). Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dan dikuasai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2025 dan 2024. (Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan terlampir).			
12.	Aset Tetap Lainnya	**629.361.400,00**		**629.361.400,00**
	Saldo awal Tahun 2024 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya bertambah sebesar Rp. 629.361.400,-. Pada Tahun 2025 nilai Aset Tetap Lainnya tidak ada, alias tetap. Jumlah tesebut merupakan nilai Aset Tetep Lainnya yang dan dikuasai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2025 dan 2024. (Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan terlampir).			
13.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	**16.672.000,00**		**39.329.900,00**
	Pada Tahun 2024 saldo awal Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp. 39.329.900,00,-. Pada Tahun 2025 terjadi pengurangan nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp 22.657.900,-, berupa Reklas keluar ke Kib C sebesar Rp 22.657.900.-, yang terdiri dari biaya perencanaan masjid di lingkungan komplek kantor bupati. Jumlah tesebut merupakan nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan yang dan dikuasai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2025 dan 2024. (Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan terlampir).			
14.	Aset Lainnya	**3.252.060.456,00**		**1.875.041.997,00**
	Saldo Awal Tahun 2024 Aset Lainnya sebesar Rp. 1.875.041.997,-.Pada Tahun 2025 Aset Lainnya bertambah sebesar Rp. 1.933.573.050,-, berupa mutasi masuk antar OPD sebesar Rp 1.933.573.050,-, yang terdiri dari kendaraan roda dua 25 unit (lelang) sebesar Rp 196.573.050,-, dan kendaraan roda empat 5 unit (lelang) sebesar Rp 1.737.000.000,-. Dan pada Tahun 2025 terjadi penghapusan kendaraan sebesar Rp. 556.554.591,- yang terdiri dari Kendaraan Roda Dua 22 Unit (lelang) sebesar Rp. 247.269.591,-, Kendaraan Roda Tiga 3 Unit (lelang) sebesar Rp. 76.785.000,-, sesuai SK Bupati No. 000.2.3.2/ 163/ BUP-LK/VII/ 2025, dan Kendaraan Roda Empat 4 Unit (lelang) sebesar Rp. 230.500.000,-, sesuai SK Bupati No. 000.2.3.2/ 300/ BUP-LK/ XII/ 2025. Sehingga Aset Lainnya yang dan dikuasai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2025			

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)		Tahun 2024 (Rp)
	sebesar Rp. 3.252.060.456,-. (Rincian Aset Lainnya disajikan terlampir).			

B. PENYUSUTAN

	Akumulasi penyusutan aset tetap	**(92.997.059.481,95)**		**(88.189.427.299,96)**
1.	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	**(33.172.914.302,73)**		**(31.734.734.622,69)**
2.	Akumulasi penyusutan gedung dan bagunan	**(9.318.956.295,20)**		**(8.895.202.787,65)**
3.	Akumulasi penyusutan JIJ	**(50.505.188.884,02)**		**(47.559.489.889,62)**
4.	Akumulasi penyusutan Aset Lainnya (Aset rusak berat dan aset tak berwujud)	**(3.177.190.456,00)**		**(1.800.171.997,00)**

C. KEWAJIBAN

Jumlah Kewajiban **46.515.006,00** **112.961.467,00**

1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00		0,00
	Pada Tahun 2025 tidak ada utang pihak ketiga.			
2.	Utang jangka pendek lainnya	**46.515.006,00**		**112.961.467,00**
	Pada Tahun 2025 ada Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp. 46.515.006,-. yang terdiri dari air (PDAM) sebesar Rp. 5.591.425,-. Listrik sebesar Rp. 40.923.581,-. yang dibayar pada tahun 2026.			
3.	Pendapatan yang ditangguhkan	0,00		0,00
	Tidak ada pendapatan yang ditangguhkan pada tahun ini.			

D. EKUITAS

	Ekuitas	**71.844.332.481,80**		**75.423.987.416,79**

Jumlah tersebut merupakan nilai ekuitas pada Sekretariat Daerah per 31 Desember 2025.

Yang Terdiri Dari :

Jumlah Aset Lancar : 293.870.654,00

Jumlah Aset Tetap : 71.596.976.833,80

Jumlah Kewajiban : 46.515.006,00

5.3 Laporan Operasional

Pendapatan

8.1.1	**BEBAN PENDAPATAN RETRIBUSI**	**173.517.000,00**	**30,580.000,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam tahun anggaran 2025 dan 2024.

Beban Operasi	**36.269.348.457,00**	**34.690.160.397,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2025 dan 2024. Jumlah beban-LO terperinci sebagai berikut :

NO. Rek	URAIAN	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
8.1.01	**BEBAN PEGAWAI –LO**	**14.859.516.539,00**	**13.333.729.975,00**
Beban pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :			
8.1.01.01	**BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN – LO**	**9.896.685.017,00**	**8.504.734.908,00**
8.1.01.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi-LO	5.938.895.098,00	5.736.305.672,00
8.1.01.01.02	Gaji Pokok PPPK/ Uang Representasi-LO	1.315.605.165,00	538.204.929,00
8.1.01.02.01	Tunjangan Keluarga PNS-LO	592.670.288,00	584.944.100,00
8.1.01.02.02	Tunjangan Keluarga PPPk-LO	117.024.148,00	46.644.416,00
8.1.01.03.01	Tunjangan Jabatan-LO	339.935.000,00	357.440.000,00
8.1.01.04.01	Tunjangan Fungsional PNS-LO	446.416.000,00	342.363.340,00
8.1.01.04.02	Tunjangan Fungsional PPPK-LO	93.111.000,00	88.746.000,00
8.1.01.05.01	Tunjangan Fungsional Umum PNS-LO	135.750.000,00	137.840.000,00
8.1.01.05.02	Tunjangan Fungsional Umum PPPK-LO	47.085.406,00	0,00
8.1.01.06.01	Tunjangan Beras PNS-LO	323.572.560,00	321.979.320,00
8.1.01.06.02	Tunjangan Beras PPPK-LO	88.036.580,00	30.126.720,000
8.1.01.07.01	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO	82.427.851,00	77.316.157,00
8.1.01.08.01	Pembulatan Gaji PNS-LO	80.925,00	85.611,00
8.1.01.08.02	Pembulatan Gaji PPPK-LO	18.531,00	7.796,00
8.1.01.09.01	Iuran Jaminan Kesehatan PNS-LO	256.562.035,00	167.635.651,00
8.1.01.09.02	Iuran Jaminan Kesehatan PPPK-LO	58.687.087,00	23.094.672,00
8.1.01.10.01	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS-LO	12.247.452,00	11.824.782,00
8.1.01.10.02	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK-LO	2.953.896,00	1.107.216,00
8.1.01.11.01	Iuran Jaminan Kematian PNS-LO	36.742.659,00	35.474.659,00
8.1.01.11.02	Iuran Jaminan Kematian PPPK-LO	8.861.336,00	3.321.504,00
8.1.01.02	**BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN – LO**	**4.342.988.355,00**	**4.140.348.3358,00**
8.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS-LO	4.233.747.597,00	4.054.518.892,00
8.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK-LO	24.757.715,00	4.263.771,00
8.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS-LO	53.676.491,00	56.909.125,00
8.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi PNS-LO	24.656.552,00	24.656.547,00
8.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbang Objektif ASN-LO	6.150.000,00	
8.1.01.03	**BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA ASN – LO**	**0,00**	**105.240.000,00**
8.1.01.03.02	Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	105.240.000,00
8.1.01.05	**BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN KDH/ WKDH – LO**	**209.530.167,00**	**171.560.332,00**
8.1.01.05.01	Gaji Pokok KDH/ WKDH-LO	97.500.000,00	54.600.000,00
8.1.01.05.02	Tunjangan Keluarga-LO	7.014.000,00	7.056.000,00
8.1.01.05.03	Tunjangan Jabatan-LO	91.260.000,00	98.280.000,00
8.1.01.05.04	Tunjangan Beras-LO	7.388.840,00	7.097.160,00
8.1.01.05.05	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO	418.847,00	421.852,00
8.1.01.05.06	Pembulatan Gaji KDH/ WKDH-LO	880,00	360,00
8.1.01.05.07	Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/ WKDH-LO	5.500.320,00	3.655.680,00

8.1.01.05.08	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/ WKDH-LO	112.320,00	112.320,00
8.1.01.05.09	Iuran Jaminan Kematian KDH/ WKDH-LO	336.960,00	336.960,00
8.1.01.06	**BEBAN PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DPRD SERTA KDH/ WKDH – LO**	**410.313.000,00**	**411.846.400,00**
8.1.01.06.02	Dana Operasional KDH/ WKDH	410.313.000,00	411.846.400,00
8.1.02.01.	**BEBAN BARANG DAN JASA**	**18.323.131.918,00**	**19.967.767.254,00**
8.1.02.01.01	**Beban Barang**	**3.318.415.628,00**	**4.040.090.522,00**

Jumlah tersebut merupakan beban barang dalam tahun 2025. Jumlah beban barang tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

8.1.02.01.01	**BEBAN BAHAN PAKAI HABIS**	**3.302.857.606,00**	**3.857.478.690,00**
8.1.02.01.01.01	Beban bahan-bahan bangunan dan kontruksi-LO	0,00	4.989.000,00
8.1.02.01.01.02	Beban Bahan-Bahan Kimia-LO	1.080.000,00	0,00
8.1.02.01.01.04	Beban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas-LO	287.665.325,00	356.369.538,00
8.1.02.01.01.05	Beban Bahan baku bangunan-LO	0,00	0,00
8.1.02.01.01.08	Beban Bahan/ Bibit Tanaman-LO	0,00	6.300.000,00
8.1.02.01.01.09	Beban bahan-isi ulang tabung pemadam kebakaran-LO	0,00	0,00
8.1.02.01.01.10	Beban bahan-isi tabung gas-LO	11.591.800,00	19.031.000,00
8.1.02.01.01.12	Beban bahan-bahan lainnya-LO	327.531.736,00	17.000.000,00
8.1.02.01.01.24	Beban alat tulis kantor-LO	187.029.776,00	163.968.045,00
8.1.02.01.01.25	Beban alat/ bahan utk kegiatan kantor-kertas dan cover-LO	750.000,00	0,00
8.1.02.01.01.26	Beban Belanja cetak-LO	155.841.366,00	255.020.998,00
8.1.02.01.01.27	Beban perangko, materai dan benda pos lainnya-LO	11.000.000,00	19.720.000,00
8.1.02.01.01.31	Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering, kabel listrik)-LO	39.198.940,00	141.595.600,00
8.1.02.01.01.32	Beban alat/ bahan utk kegiatan kantor-perlengkapan dinas-LO	0,00	59.843.317,00
8.1.02.01.01.34	Beban alat/ bahan utk kegiatan kantor-perlengkapan pendukung olah raga-LO	19.347.000,00	35.910.000,00
8.1.02.01.01.36	Beban alat/ bahan utk kegiatan kantor lainnya-LO	232.990.468,00	108.617.392,00
8.1.02.01.01.37	Beban Obat-obatan-LO	10.539.000,00	7.511.000,00
8.1.02.01.01.38	Beban Obat-obatan Lainnya-LO	9.500,00	0,00
8.1.02.01.01.44	Beban Natura dan Pakan-Pakan-LO	7.200.000,00	0,00
8.1.02.01.01.51	Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya-LO	0,00	21.881.802,00
8.1.02.01.01.52	Belanja makanan dan minuman rapat-LO	79.575.900,00	110.335.660,00
8.1.02.01.01.53	Beban Belanja makanan dan minuman tamu-LO	1.240.864.527,00	2.064.809.680,00
8.1.02.01.01.58	Beban Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan-LO	316.589.200,00	110.455.000,00
8.1.02.01.01.59	Belanja Pakaian Dinas KDH/ WKDH-LO	178.112.068,00	187.043.260,00
8.1.02.01.01.63	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)-LO	0,00	0,00
8.1.02.01.01.64	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)-LO	1.550.000,00	10.500.000,00
8.1.02.01.01.74	Beban Belanja pakaian adat daerah-LO	194.391.000,00	178.459.000,00
8.1.02.01.04	**BEBAN ASET TETAP YANG TIDAK MEMENUHI KRITERIA KAPITALISASI**	**15.558.022,00**	**153.570.030,00**
8.1.02.01.04.117	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor Lainnya	9.879.000,00	0,00
8.1.02.01.04.123	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.424.600,00	153.570.030,00
8.1.02.01.04.132	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	392.822,00	0,00
8.1.02.01.04.405	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	575.000,00	0,00
8.1.02.01.04.509	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.286.600,00	0,00
8.1.02.02	**BEBAN JASA**	**9.958.953.913,00**	**10.065.936.176,00**

Jumlah tersebut merupakan beban Jasa dalam tahun 2025. Jumlah beban jasa tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

8.1.02.02.01	**BEBAN JASA KANTOR**	**8.592.373.571,00**	**8.747.931.250,00**
8.1.02.02.01.03	Beban jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor-LO	852.250.000,00	4.539.750.000,00
8.1.02.02.01.04	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-LO	47.400.000,00 10.000.000,00	111.450.000,00 0,00

8.1.02.02.01.07	Beban Honorarium Rohaniwan-LO	4.095.100.000,00	0,00
8.1.02.02.01.11	Beban Honorarium Penyelenggara Kegiatan-LO	629.950.000,00	0,00
8.1.02.02.01.26	Beban Jasa Tenaga Administrasi-LO	1.279.000.000,00	950.103.471,00
8.1.02.02.01.28	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum-LO	183.170.000,00	326.855.000,00
8.1.02.02.01.29	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nrasumber-LO	26.250.000,00	49.950.000,00
8.1.02.02.01.30	Beban Jasa Kebersihan Kantor-LO	0,00	984.033.322,00
8.1.02.02.01.31	Beban Jasa Tenaga Keamanan-LO	55.050.000,00	94.950.000,00
8.1.02.02.01.33	Beban Jasa Tenaga Sopir-LO	0,00	324.164.560,00
8.1.02.02.01.35	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik-LO	0,00	30.920.000,00
8.1.02.02.01.41	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telpon dll-LO	0,00	0,00
8.1.02.02.01.48	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi-LO	115.760.259,00	30.000.000,00
8.1.02.02.01.49	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dll-LO	29.000.010,00	23.150.600,00
8.1.02.02.01.55	Beban Jasa Iklan/ Reklame, Film dan Pemotretan-LO	0,00	0,00
8.1.02.02.01.59	Beban jasa telepon-LO	31.250.521,00	37.883.736,00
8.1.02.02.01.60	Beban jasa air-LO	56.727.175,00	66.602.050,00
8.1.02.02.01.61	Beban jasa listrik-LO	446.209.053,00	576.349.142,00
8.1.02.02.01.62	Beban jasa surat kabar/majalah-LO	0,00	0,00
8.1.02.02.01.63	Beban jasa kawat/faksimili/internet-LO	90.976.894,00 5.887.150,00	128.721.824,00 0,00
8.1.02.02.01.67	Beban Pajak Bumi dan Bangunan-LO	92.128.309,00	67.606.645,00
8.1.02.02.01.71	Beban Lembur-LO	429.117.700,00	396.373.000,00
8.1.02.02.01.73	Beban Medical Check Up-LO	26.486.500,00 90.660.000,00	9.067.900,00 0,00
8.1.02.02.02.05	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN-LO	78.687.504,00	97.050.464,00
8.1.02.02.02.06	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN-LO	130.834.816,00	100.780.800,00
8.1.02.02.02.07	Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN-LO	163.543.522,00	125.976.000,00
8.1.02.02.04.12	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya-LO	0,00	0,00
8.1.02.02.04.36	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang-LO	0,00	126.000.000,00
8.1.02.02.04.37	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang-LO	119.000.000,00	15.000.000,00
8.1.02.02.04.123	Beban sewa alat RT lainnya-LO	202.218.000,00	25.000.000,00
8.1.02.02.04.125	Beban sewa meja kerja pejabat-LO	0,00	0,00
8.1.02.02.04.355	Beban sewa peralatan umum-LO	60.940.000,00	149.805.000,00
8.1.02.02.05.09	Beban Belanja sewa gedung/ kantor/tempat-LO	12.660.000,00	9.000.000,00
8.1.02.02.05.36	Beban Belanja sewa taman/ bunga utk taman hias-LO	0,00	200.000.000,00
8.1.02.02.05.43	Beban sewa hotel-LO	80.142.000,00	56.845.000,00
8.1.02.02.07.28	Beban sewa alat musik-LO	0,00	0,00
8.1.02.02.07.31	Beban sewa barang bercorak kesenian lainnya-LO	0,00	0,00
8.1.02.02.08.02	Beban Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan-LO	0,00	0,00
8.1.02.02.12.01	Beban Khursus Singkat/ Pelatihan-LO	155.600.000,00	0,00
8.1.02.02.12.02	Beban Belanja Sosialisasi-LO	42.704.500,00	58.777.662,00
8.1.02.02.12.03	Beban Belanja Bimbingan Teknis-LO	320.250.000,00	353.770.000,00
8.1.02.03	**BEBAN PEMELIHARAAN**	**1.647.175.485,00**	**1.232.864.745,00**
8.1.02.03.02.35	Beban pemeliharaan alat angkutan darat bermotor perorangan-LO	214.557.012,00	195.850.914,00
8.1.02.03.02.36	Beban pemeliharaan alat angkutan darat bermotor penumpang-LO	886.521.873,00	828.577.346,00
8.1.02.03.02.38	Beban pemeliharaan alat angkutan darat bermotor berroda dua-LO	88.398.950,00	90.041.505,00
8.1.02.03.02.117	Beban Belanja Pemeliharaan Pritn dan Pringkpn Kntor-LO	45.390.150,00	53.198.080,00
8.1.02.03.02.121	Beban pemeliharaan alat pendingin-LO	17.423.500,00	36.508.000,00
8.1.02.03.02.405	Beban pemeliharaan Komputer, Komputer Unit, Personal Computer-LO	38.447.000,00	28.688.900,00
8.1.02.03.02.406	Beban pemeliharaan komputer unit lainnya-LO	4.437.000,00	0,00
8.1.03.03	**BEBAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN**	**351.884.697,00**	**174.405.800,00**

8.1.02.03.03.01	Beban pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor-LO	43.967.327,00	0,00
8.1.02.03.03.09	Beban pemeliharaan bangunan gedung tempat bangunan gedung tempat pertemuan-LO	0,00	83.763.800,00
8.1.02.03.03.38	Beban pemeliharaan bangunan gedung tempat tinggal-lainnya-LO	307.917.370,00	90.642.000,00
8.1.02.04	**BEBAN PERJALANAN DINAS**	**1.845.588.995,00**	**2.709.176.691,00**
8.1.02.04.01.01	Beban Belanja perjalanan dinas biasa-LO	1.723.678.995,00	2.664.726.691,00
8.1.02.04.01.03	Beban Belanja perjalanan dinas dalam kota-LO	31.910.000,00	44.450.000,00
8.1.02.04.02.01	Beban Belanja perjalanan dinas biasa-luar negeri-LO	90.000.000,00	0,00
8.1.02.05	**BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT**	**1.553.113.200,00**	**1.745.293.320,00**
8.1.02.05.01	**Beban Uang yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat**	**20.113.200,00**	**1.745.293.320,00**
8.1.02.05.01.01	Beban Hibah yang Bersifat Perlombaan-LO	0,00	1.715.300.000,00
8.1.02.05.01.02	Beban Penghargaan atas suatu prestasi-LO	20.113.200,00	29.993.320,00
8.1.02.05.02	**Beban Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat**	**1.533.000.000,00**	**0,00**
8.1.02.05.02.01	Beban Penghargaan pihak ketiga/ pihak lain-LO	1.533.000.000,00	0,00
8.1.05	**BEBAN HIBAH**	**3.086.700.000,00**	**1.571.275.000,00**

Jumlah tersebut merupakan beban Hibah dalam tahun 2025. Jumlah beban hibah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

8.1.05.	**BEBAN HIBAH**	**3.086.700.000,00**	**1.571.275.000,00**
8.1.05.05.01.01	Beban belanja hibah barang kepada badan dan lembaga yg bersifat nirlaba dll-LO	660.000.000,00	500.000.000,00
8.1.05.05.02.01	Beban belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba yg memiliki surat keterangan terdaftar-LO	2.426.700.000,00	1.071.275.000,00
8.1.07	**BEBAN PENYISIHAN PIUTANG**	**0,00**	**0,00**
8.1.08	**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**	**4.807.632.161,99**	**34.534.845.031,68**
8.1.08.01	**Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**	**1.438.179.680,04**	**1.688.046.872,02**
8.1.08.02	**Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan**	**423.753507,55**	**245.082.317,93**
8.1.08.03	**Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi**	**2.945.698.994,40**	**31.925.255.494,35**
8.1.08.07	**Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain**	**0,00**	**734.554.591,00**
	JUMLAH BEBAN	**41.076.980.638,99**	**69.407.617.260,68**

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut :

Ekuitas Awal	**75.423.987.416,79**	**49.064.829.532,47**

Ekuitas awal ini merupakan nilai kekayaan bersih yang di miliki Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari :

1. Jumlah Aset Lancar	:	278.744.036,00	103.143.725,00
2. Jumlah Aset Tetap	:	75.258.204.847,79	49.017.756.308,47
3. Jumlah Aset Lainnya	:	0,00	0,00
Jumlah Ekuitas	**:**	**75.423.987.416,79**	**49.064.829.532,47**

Surplus/Defisit-LO	**(40.903.463.638,99)**	**(69.377.037.260,68)**

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp. (40.903.463.638,99)

R/K PPKD	**37.378.308.704,00**	**36.824.186.616,00**

R/K PPKD merupakan selisih antara belanja kurang pendapatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 37,378.308,704,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

	0,00	**0,00**

- **Koreksi Nilai Persediaan** **0,00** **0,00**

  Merupakan jumlah koreksi nilai persediaan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00

- **Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap** **0,00** **0,00**

  Merupakan jumlah koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00

- **Lain-Lain** **(54.500.000,00)** **58.912.008.529,00**

  Merupakan jumlah Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. (54.500.000,00)

Ekuitas Akhir	**71.844.332.481,80**	**75.423.987.416,79**

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdiri dari :

1. Jumlah Aset Lancar	:	293.870.654,00	278.744.036,00
2. Jumlah Aset Tetap	:	71.596.976.833,80	75.258.204.847,79
3. Jumlah Aset Lainnya	:	0,00	0,00
Jumlah Ekuitas	**:**	**71.844.332.481,80**	**75.423.987.416,79**

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, merupakan perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan urusan rumah tangga daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- **Sekretaris Daerah**
- ***Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat*** *,terdiri dari :*
  - Bagian Pemerintahan
  - Bagian Kesejahteraan Rakyat
  - Bagian Hukum
- ***Asisten Perekonomian dan Pembangunan****, terdiri dari :*
  - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
  - Bagian Administrasi Pembangunan
  - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Asisten Administrasi Umum*, terdiri dari :*

- Bagian Umum
- Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- Bagian Organisasi

C. Aspek Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

1. Peran Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Sesuai Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, tugas pokok

Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dengan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah, pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas sekali bahwa peran Sekretariat Daerah sesuai kewenangannya dalam membantu pimpinan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat menentukan sekali dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota keadaan Desember 2025 sebanyak 121 orang PNS, PPPK sebanyak 105 orang.

D. Hambatan – hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan berkaitan dengan proses pencairan dana APBD, ini disebabkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah dilaksanakan pada kegiatan yang bersangkutan lambat dalam proses penyelesaian dan penyampaian ke Bendahara.

BAB VII
PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing. Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari; Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas laporan Keuangan (CaLK). Sekretariat Daerah sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Total Realisasi belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp 37.351.946.331,00 atau 91,60 % dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 40.971.527.809,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Pegawai	15.986.666.014,00	14.859.516.539,00	92,95
Belanja Barang dan Jasa	20.435.061.412,00	18.874.456.582,00	92,36
Belanja Hibah	3.699.130.383,00	3.086.700.000,00	83,44
Belanja Modal	850.670.000,00	711.273.210,00	83,61
Jumlah	**40.971.527.809,00**	**37.351.946.331,00**	**91,60**

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target dan indikator kinerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.

BAB VII
PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing. Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari; Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas laporan Keuangan (CaLK). Sekretariat Daerah sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Total Realisasi belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp 37.351.946.331,00 atau 91,60 % dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 40.971.527.809,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Pegawai	15.986.666.014,00	14.859.516.539,00	92,95
Belanja Barang dan Jasa	20.435.061.412,00	18.874.456.582,00	92,36
Belanja Hibah	3.699.130.383,00	3.086.700.000,00	83,44
Belanja Modal	850.670.000,00	711.273.210,00	83,61
Jumlah	**40.971.527.809,00**	**37.351.946.331,00**	**91,60**

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target dan indikator kinerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.